

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	25
A. PENGERTIAN DAN SEJARAH PERJALANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA	25
1. PEMILIHAN UMUM.....	25
a. Pengertian PEMILU.....	25
b. Pemilu menurut para ahli	27
c. Sistem pemilu.....	29
d. Asas-asas pemilu.....	34
e. Manfaat pemilu	35
f. Tahapan pemilu.....	37
2. PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM LINTAS SEJARAH.....	39
a. Perbandingan model pemilihan kepala daerah dalam berbagai Undang-Undang pemerintah daerah	39
b. Jenis model pemilihan kepala daerah.....	46
3. INTERPRETASI MAKNA DEMOKRASI DALAM PASAL 18 AYAT 4 UUD RI 1945	49

4. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS PEMILIHAN KEPALA DAERAH	50
5. HUBUNGAN KEPALA DAERAH DENGAN WAKIL KEPALA DAERAH.....	51
B. SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	52
1. Pengertian sistem ketatanegaraan Indonesia.....	52
2. Latar belakang amandemen.....	54
3. Tujuan amandemen	55
4. Tahapan amandemen.....	55
5. Perubahan UUD 1945	56
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UU NO.22 TAHUN 2014.....	63
1. Tata cara Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi (Gubernur).....	69
2. Tata cara Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota)	79
B. MODEL PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH MENURUT UU NO.22 TAHUN 2014.....	95
1. Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah(LPPD).....	96
2. Isi Materi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah	98
a. Laporan Umum Pemerintahan	98
b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Rangka Desentralisasi	99
c. Laporan kebijakan dan pendelegasian wewenang serta pelaksanaan tugas kecamatan bagi kabupaten/kota	102
d. Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan.....	102
e. Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas dekosentrasi (bagi gubernur sesuai kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah)	102
f. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	102

3. Mekanisme Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).....	102
BAB IVPENUTUP	105
A. KESIMPULAN	105
B. SARAN	107
DAFTAR PUSTAKA	109